

PARTISIPASI ANGGOTA MENUJU KEMANDIRIAN USAHA KOPERASI

Endah SM*

ABSTRACT

Quality of participation hardly determines in the effort reaching independence a co-operation; divided to become three participation variables that is member, management and program which can depict participation of member in co-operation service. Attainment of independence in co-operation requires time sufficiently long, because requires of legalistic process of growth; there are four phases which must be passed by in process of growth is started by attempt phase, fast development, level of growth downdraft and ends in the happening of stability or slump. To the four phases must can be passed by carefully so that will be able to yield independence in co-operation if condition of organization had stable.

Keywords: *Participation, Busines Independence.*

PENDAHULUAN

Anggota koperasi merupakan salah satu pihak yang menentukan keberhasilan sebuah koperasi, karena berapapun besarnya biaya pembinaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, gencarnya kampanye gerakan koperasi serta tingginya dedikasi dari pengurus, Badan Pengawas dan Manager tidak akan membuat sebuah koperasi berkembang tanpa adanya partisipasi aktif dari para anggotanya. Kedudukan anggota dalam koperasi sangat penting karena anggota sebagai pemilik (*owners*) dan juga merupakan pelanggan (*users*) bagi koperasi yang menentukan maju dan mundurnya koperasi.

Koperasi menjadi kebutuhan dalam upaya meningkatkan perekonomian rakyat, terlebih dalam krisis pangan dan krisis energi yang

dialami Indonesia kali ini. Sepatutnya pembangunan perekonomian Indonesia dilandasi pada upaya pemberdayaan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, karena hakekatnya, koperasi sebagai institusi atau lembaga perekonomian tidak sebatas pada kepentingan-kepentingan ekonomi saja melainkan juga bertujuan untuk mensejahterakan terutama anggota-anggota koperasi dan masyarakat sekaligus merupakan cermin keberhasilan suatu koperasi.

Sebagai pemilik maupun pelanggan merupakan kunci utama dalam kemajuan koperasi, karena koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang menitikberatkan pada partisipasi anggotanya. Keberhasilan suatu koperasi tidak lepas dari partisipasi seluruh anggota baik partisipasi modal, partisipasi dalam kegiatan usaha, maupun partisipasi pengambilan keputusan karena

* Endah SM. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam sebuah koperasi. Dengan demikian partisipasi anggota dalam koperasi diibaratkan darah dalam tubuh manusia, karena pada kenyataannya untuk mempertahankan diri, pengembangan dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggota koperasi.

Fenomena yang timbul pada pertumbuhan koperasi di Indonesia yaitu pertumbuhan kuantitas koperasi tidak diimbangi dengan pertumbuhan kualitas yang baik sehingga banyak koperasi yang pasif. Salah satu kendalanya disebabkan masih banyak anggota yang kurang berpartisipasi aktif dalam kehidupan berkoperasi, padahal partisipasi anggota dalam koperasi sangat penting perannya untuk memajukan dan mengembangkan koperasi sesuai pendapat yang diungkapkan oleh Ropke (2003) yang menyatakan bahwa "Tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi, akan lebih besar". Partisipasi merupakan peran serta anggota dalam mengawasi jalannya usaha, permodalan dan menikmati keuntungan usaha serta keterlibatan anggota dalam mengevaluasi hasil-hasil kegiatan koperasi. Tanpa adanya partisipasi anggota, koperasi tidak akan ada artinya dan tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien. Partisipasi anggota terdiri atas beberapa jenis,

baik partisipasi dalam kegiatan usaha koperasi (transaksi jual beli/simpan pinjam dengan koperasi), partisipasi dalam pemupukan modal (kesadaran anggota dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela), partisipasi dalam pengambilan keputusan (mengikuti rapat-rapat anggota) dan partisipasi pengawasan. Kurangnya partisipasi anggota dalam kehidupan berkoperasi akan mengakibatkan koperasi tidak dapat menjadi organisasi mandiri, karena kemandirian di sini tidak diartikan secara sempit dalam bentuk materialnya saja akan tetapi juga dalam wujud mental dan spiritual yang dimiliki oleh seluruh anggota koperasi.

Partisipasi Anggota dalam Koperasi

Istilah partisipasi secara harfiah berasal dari bahasa asing, yaitu *participation* yang artinya mengikutsertakan pihak lain; dapat juga diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan. Pengertian koperasi menurut Roy dalam Ign. Sukamdiyo (2006) koperasi adalah "*a cooperative is defined as a business voluntarily, operating at cost, wick is owned capitalized by members patrons as users risks and benefits, proportional to their participation*". Batasan koperasi yang disosialisasikan haruslah jelas; misalnya koperasi sebagai badan usaha, apakah koperasi sebagai

gerakan, ataukah apakah koperasi sebagai suatu sistem ekonomi.

Sementara partisipasi diartikan oleh Ropke (2003) "suatu proses dimana sekelompok orang (anggota) menemukan dan mengimplementasikan ide-ide/gagasan koperasi". Pengertian tersebut lebih mengarahkan partisipasi pada suatu proses keikutsertaan anggota dalam pengambilan keputusan dalam koperasi. Dilihat dari segi dimensinya, partisipasi terdiri dari: (1) Partisipasi dipaksakan (*forced*) dan partisipasi sukarela (*voluntary*). Partisipasi dipaksakan terjadi karena paksaan undang-undang atau keputusan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan partisipasi sukarela terjadi karena kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi. (2) Partisipasi formal dan partisipasi informal. Partisipasi yang bersifat formal, biasanya tercipta suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan. Sedangkan partisipasi yang bersifat informal, biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan. (3) Partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi apabila terdapat wakil yang membawa inspirasi orang lain yang akan berbicara atas nama karyawan atau anggota dengan kelompok yang

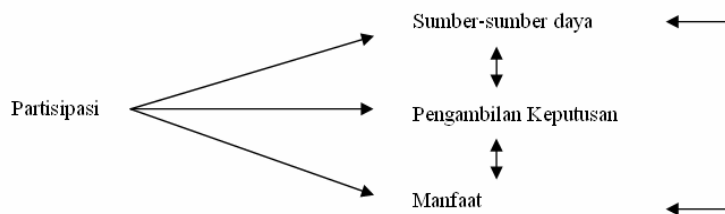
lebih tinggi tingkatannya. (4) Partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Partisipasi kontributif yaitu kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan Koperasi. Sedangkan partisipasi insentif yaitu kedudukan anggota sebagai pelanggan/pemakai dengan memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang kepentingannya.

Bentuk-bentuk partisipasi anggota dihubungkan dengan prinsip identitas ganda anggota, sebagaimana dikemukakan oleh Alfred Hanel dalam Tim Ikopin (2000) yaitu: (1) Sebagai pemilik, anggota harus turut serta dalam mengambil keputusan, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi yang biasanya dilakukan pada waktu rapat anggota. (2) Sebagai pemilik, anggota harus turut serta melakukan kontribusi modal melalui berbagai bentuk simpanan untuk memodali jalannya perusahaan koperasi. (3) Sebagai pemilik, anggota harus turut serta menanggung resiko usaha koperasi yang disebabkan oleh kesalahan manajemen. (4) Sebagai pengguna/pelanggan/pekerja/nasabah, anggota harus turut serta memanfaatkan pelayanan barang dan jasa yang disediakan oleh koperasi. Setiap anggota akan mempertimbangkan untuk memasuki dan mempertahankan/memelihara hubungannya dengan koperasi, apabila insentif

yang diperoleh lebih besar daripada kontribusi yang harus diberikan maka mereka akan melanjutkan kerjasama dengan koperasi.

Pendapat lain mengenai partisipasi dikemukakan oleh Ropke (2003) dengan membagi tipe-tipe partisipasi anggota menjadi: (1) Partisipasi dalam menggerakkan atau

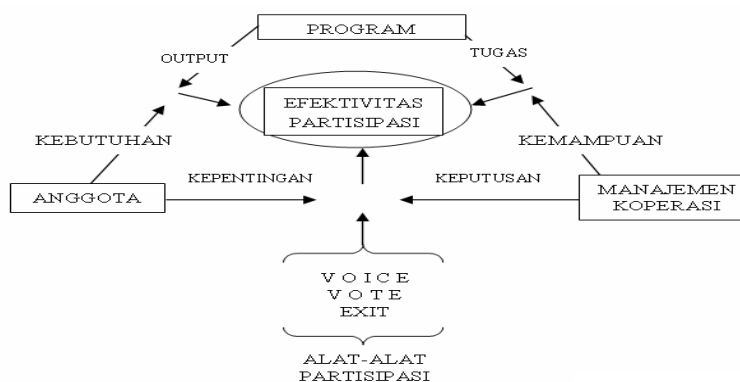
mengkontribusikan sumberdaya. (2) Partisipasi dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi/pelaksanaan, evaluasi). (3) Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat. Gambar 01 berikut ini memperlihatkan jenis-jenis partisipasi sebagai berikut.



Gambar : 01 Jenis-jenis Partisipasi
Sumber: RÖpke (2003)

Selanjutnya untuk memperoleh mutu partisipasi yang baik tergantung dari ketiga variabel sebagaimana dikemukakan David Corten dalam Ropke (2003) yaitu: (1) Anggota atau penerima manfaat. (2) Manajemen organisasi. (3) Program. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa dalam melaksanakan pelayanan yang disediakan koperasi

akan berhasil apabila terdapat kesesuaian (*fit*) antara anggota, program dan manajemen. Kesesuaian antara anggota dan koperasi adalah adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dengan keluaran (*output*) program koperasi. Model Kesesuaian partisipasi dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: 02 Model Kesesuaian Partisipasi
Sumber : RÖpke (2003)

Berdasarkan Gambar 02 menunjukkan terdapat tiga alat

utama dimana anggota koperasi dapat mengusahakan agar di dalam

keputusan yang diambil manajemen tercermin keinginan dan permintaan anggota. Ketiga alat tersebut yaitu: hak mengeluarkan pendapat (*voice*), hak suara dalam pemilihan (*vote*) dan hak keluar (*exit*). Dengan ketiga alat tersebut anggota dapat mempengaruhi manajemen dengan memberikan saran, kritik, mempengaruhi siapa yang akan dipilih sebagai pengurus atau manajer dan mempengaruhi dengan cara meninggalkan (keluar) atau mengurangi pembelian pada koperasi. Tercapainya semua bentuk partisipasi anggota itu berkaitan dengan pernyataan apakah para anggota merasa memiliki dan yakin bahwa koperasi adalah wadah yang terbaik untuk memperjuangkan dan mencapai kepentingan-kepentingan ekonominya.

Makna Koperasi Sebagai Organisasi Ekonomi dan Pendidikan

Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama bekerja sama berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan atau meningkatkan kepentingan ekonomi anggota dan kepentingan masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu ciri koperasi adalah: a) Kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal; b) Bekerjasama berdasarkan perasamaan derajat, hak yang kewajiban; jadi koperasi sebagai demokrasi ekonomi; koperasi adalah milik para anggota sendiri; c) Kegiatan koperasi harus didasarkan atas kesadaran anggota; tidak ada paksaan, ancaman dan

campur tangan pihak lain; d) Tujuan koperasi harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh para anggotanya.

Kelebihan koperasi daripada bangun perusahaan yang lain tidak dapat dibuktikan dengan semboyan. Pada koperasi tidak ada majikan dan buruh yang kepentingannya berbeda. Yang bekerja semuanya anggota yang sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasi. Pada koperasi yang terutama adalah menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan sebaik-baiknya, bukan mengejar keuntungan. Yang menjadi pokok adalah memelihara kepentingan bersama (Sukowaluyo Mintirahardjo: 2004).

Inti nilai dari kehidupan berkoperasi adalah menolong diri untuk memperbaiki keadaan (ekonomi) melalui kekuatan kolektif yang terorganisir legal atas dasar kesamaan derajat dan demi kepentingan mereka sendiri. Berdasarkan asas kemandirian tersebut maka disusunlah nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi yang mewarnai perilaku setiap sendi kehidupan organisasi koperasi. Citra koperasi yang sarat dengan nilai-nilai kebersamaan itu akan tertangkap antara lain dari keseluruhan mekanisme kerja dan perilaku orang-orang di dalamnya. Landasan yang digunakan sebagai pondasi didirikannya suatu koperasi adalah membangun aktivitas ekonomi bersama, berpijak pada kekuatan

sendiri dan kesamaan derajat dalam rangka mencapai perbaikan kehidupan ekonomi bagi seluruh anggota. Nilai dasar ini diterjemahkan ke dalam tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Agar tujuan koperasi berjalan secara operasional, maka tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota atau promosi anggota yang masih bersifat abstrak itu perlu dipertegas kembali. Maka tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota atau promosi anggota diterjemahkan ke dalam rumusan yang menunjukkan kriteria-kriteria operasional, jelas dan terukur, masuk akal serta dapat dicapai melalui upaya-upaya riil dan rasional. Rumusan operasional tersebut harus menggambarkan kebutuhan riil dari seluruh anggota. Karena itu homogenitas kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggota menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Misalnya, untuk menunjang peningkatan kesejahteraan nelayan yang menjadi anggota koperasi, maka tujuan operasional koperasi dapat dirumuskan misalnya berbunyi: "meningkatkan pendapatan anggota melalui pengadaan *input* produksi dan perbaikan harga jual ikan". Sebagaimana sering diungkapkan koperasi merupakan perkumpulan dengan mandat promosi anggota, dimana posisi anggota adalah unik yaitu "sebagai pemilik sekaligus pelanggan".

Anggota tidak sekedar menyettor modal, ikut mengambil keputusan dan mengontrol jalannya koperasi; tetapi juga harus menjadi

partner utama di dalam aktivitas usaha koperasi. Anggota adalah pemasok utama di dalam koperasi pengadaan dan nasabah utama di dalam Koperasi Simpan Pinjam. Citra diri koperasi terbentuk melalui penetapan dan penerapan nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip dasar koperasi berpusat pada identitas ganda anggota koperasi. Prinsip Identitas sebagai landasan gerak koperasi berpijak kepada prinsip *self help* dari para anggotanya, bukan orang lain. *Joint actions* yang dikembangkan bersama merupakan wujud dari usaha kolektif yang dimaksudkan untuk mendukung dan memperbaiki perekonomian masing-masing rumah tangga mereka sendiri.

Koperasi adalah perusahaan yang berkarakteristik sebagai *members promotion oriented*, yaitu perusahaan yang mendapat mandat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang otonom, dimana sekelompok individu membangun usaha bersama dan diwadahi oleh organisasi koperasi atas dasar prinsip *self help*.

Dengan demikian, berbagai upaya untuk mempromosikan anggota harus menjadi fokus dari setiap gerak koperasi. Tentu saja tanpa mengabaikan usaha-usaha untuk mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan koperasinya sendiri. Kemampuan dan potensi promosi anggota justru akan dapat ditumbuhkan apabila koperasi dikelola secara efisien dan efektif, termasuk

bila diperlukan untuk membangun jaringan kerjasama pada skala yang lebih besar melalui pendirian koperasi sekunder dan atau tersier. Daya saing dan kemampuan potensial koperasi dapat ditingkatkan bila pendayagunaan sumber-sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia dilakukan secara efisien, termasuk kemungkinan menggunakan konsep skala ekonomi.

Anggota Basis Kekuatan Koperasi

Koperasi yang benar adalah koperasi yang didirikan atas kehendak sekelompok individu (anggota) untuk membangun kekuatan kolektif demi kemanfaatan bersama, bukan didirikan misalnya ada instruksi dari manapun datangnya koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha karena usaha itu dikehendaki oleh anggota, bukan kehendak pihak lain atau pengurus semata-mata. Posisi anggota koperasi adalah unik, pemilik sekaligus pelanggan koperasinya. Keunikan anggota tersebut harus menjadi kekuatan pokok dari koperasi, menjadi pilar koperasi. Koperasi yang lepas dari kepentingan anggota berarti telah melepaskan pilar penyangga kekuatannya sendiri. Anggota koperasi adalah mereka yang harus memiliki kemampuan untuk berfungsi organisasi pemilik dan pelanggan koperasi.

Keterikatan ekonomi antara anggota dengan koperasi menjadi lebih mudah dibangun apabila koperasi berbentuk tujuan tunggal dari tujuan ganda. Di dalam koperasi yang tujuan tunggal usaha koperasi akan terfokus pada pelayanan yang

homogen, sehingga efisiensi (misalnya melalui skala ekonomi) dapat diperhitungkan lebih akurat. Koperasi yang bertujuan tunggal lebih mudah dikelola dari koperasi bertujuan ganda. Karena itu di dalam organisasi koperasi perlu pula dibangun sistem manajemen keanggotaan yang baik. Fakta menunjukkan bahwa karena jumlah anggota menjadi salah satu kriteria keberhasilan koperasi, maka muncullah istilah-istilah calon anggota atau anggota yang dilayani, yang sebenarnya adalah bukan anggota.

Seyogyanya koperasi memiliki data lengkap dan setiap individu anggotanya. Koperasi di Indonesia sudah sejak kemerdekaan memiliki landasan hukum yang sangat kuat dengan diakuinya lembaga ini organisasi salah satu bentuk organisasi yang turut aktif memperjuangkan kondisi ekonomi masyarakat. Koperasi telah memperoleh kedudukan sentral seperti tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Sebagai organisasi, koperasi termasuk ke dalam bentuk badan usaha formal yang keberadaannya di Indonesia diatur dengan Undang Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 fungsi dan peranan koperasi mengemban tugas antara lain: (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; (2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas hidup dan masyarakat; (3) Memperkokoh

perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru; dan (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Partisipasi Anggota dalam Kemandirian Koperasi

Dalam koperasi kemandirian merupakan salah satu prinsip koperasi yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang harus dijalankan oleh setiap jenis koperasi apapun.

Menurut pendapat Sitio (2001); kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam hal kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan dalam kemandirian koperasi. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya yaitu berkomitmen dalam setiap aktivitas ekonomi dilakukan melalui koperasi dan tentu saja dengan pelayanan koperasi yang sesuai dengan keinginan anggota maka aspek kemandirian ini akan tercapai. Kemandirian dalam koperasi

merupakan faktor pendorong (motivator) bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan. Akan tetapi pada kenyataannya seperti yang diungkapkan oleh Ropke (2003) bahwa: Koperasi dapat menjadi organisasi yang benar-benar swadaya (mandiri), tetapi koperasi dapat dan sering pula diorganisir untuk memperoleh bantuan dari luar. Hal itulah yang mengharuskan koperasi memiliki komitmen dalam proses operasionalnya.

Kegiatan koperasi harus didasarkan pada prinsip swadaya atau kemandirian dengan modal utamanya adalah kepercayaan dan keyakinan yang sesungguhnya berakar dari sikap setiap anggota koperasi. Kemandirian koperasi akan terwujud tidak selalu tergantung dan ditentukan oleh tingkat pendapatan anggota koperasi melainkan oleh suatu keyakinan untuk melakukan usaha bersama dengan memiliki komitmen dan motivasi yang kuat dalam kondisi apapun, dengan kata lain berani menanggung resiko. Anggota yang dalam hal ini sebagai pemeran utama dalam kehidupan berkoperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kekuatan hidup suatu organisasi koperasi. Ketiga perangkat organisasi memiliki hak yang dapat diterima dari pelayanan yang diberikan oleh koperasi dan kewajiban yang harus dilakukan untuk kelangsungan hidup koperasi.

Pencapaian kemandirian dalam koperasi memang memerlukan

waktu yang tidak sedikit, karena diperlukannya proses sesuai dengan hukum pertumbuhan yang dipaparkan oleh Pumpin dan Range dalam Ropke (2003) bahwa terdapat empat fase yang harus dilalui dalam proses pertumbuhan yang dimulai dengan fase percobaan, perkembangan yang pesat, tingkat penurunan pertumbuhan dan berakhir dengan terjadinya stabilitas atau kemerosotan. Ke empat fase itu harus dapat dilalui dengan baik sehingga akan dapat menghasilkan kemandirian dalam koperasi jika kondisi organisasi telah stabil. Kestabilan dalam kemandirian ini harus dijaga dengan terus mencari peluang-peluang untuk berkembang dan mempertahankan hidup karena jika tidak dilakukan mungkin kemerosotan yang akan terjadi untuk tahap selanjutnya. Semua ini memang tergantung dari berapa besar partisipasi yang diberikan oleh anggota kepada koperasi yang dapat dilihat dari hubungan identitas yang dapat diwujudkan apabila pelayanan yang diberikan oleh koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggotanya.

Kualitas partisipasi sangatlah menentukan dalam upaya mencapai kemandirian seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa menurut pendapat Korten dalam Ropke (2003) membagi kualitas partisipasi menjadi tiga variabel yaitu anggota, manajemen dan program yang dapat menggambarkan partisipasi anggota dalam pelayanan koperasi akan terwujud jika terjalin kesesuaian diantaranya. Selanjutnya

dipaparkan pula tentang kesesuaian yang pertama, yaitu antara anggota sebagai penerima manfaat dengan program harus merupakan kesesuaian antara kebutuhan anggota dengan pelayanan dan berbagai sumberdaya yang disediakan koperasi sebagai *output* dari program. Kesesuaian yang kedua, yaitu antara anggota dan manajemen dimana anggota harus memiliki kemampuan dan mau untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka dalam suatu keputusan yang diberikan oleh manajemen dalam suatu organisasi koperasi. Kesesuaian yang ketiga, yaitu harus adanya kesesuaian antara program dan manajemen dimana manajemen koperasi harus mampu melaksanakan kepentingan tugas program sesuai dengan kebutuhan anggota.

Korten dalam Ropke (2003) memperkenalkan pendekatan proses belajar yang ideal manajemen bagi pengembangan program dalam koperasi terdiri dari tiga tahap belajar yaitu: (1) Belajar menjadi efektif, tujuan dari proses belajar ini adalah untuk mencapai efektivitas pengembangan anggota koperasi dan tugas utamanya adalah memperoleh keuntungan komparatif koperasi dan mendirikan organisasi untuk melaksanakan peluang tersebut. (2) Belajar menjadi efisien, tujuan dari proses belajar ini merupakan tindak lanjut dari tercapainya efektivitas yang sudah mapan dan tugas utamanya adalah memaksimalkan kesejahteraan anggota, hal ini dapat dilaksanakan karena kekurangtahuan/ketidaktahuan dalam fase ini telah dapat diatasi. (3) Belajar

memperluas, tujuan dari proses ini adalah untuk membangun organisasi yang lebih besar dalam mendapatkan keuntungan potensial yang berlipat ganda, dan tugas utamanya yaitu melakukan perluasan peluang yang diberikan koperasi terhadap anggota secara efektif dan efisien. Fase belajar memperluas memiliki karakteristik kemantapan dimana pada fase ini koperasi telah sarat pengalaman dan telah melalui proses untuk menuju kemandirian dalam berkehidupannya. Jika koperasi berada dalam kondisi dapat memperluas usahanya maka kemandirian sudah terdapat di dalamnya.

Kesesuaian antara anggota, manajemen dan program merupakan suatu keterikatan dalam mencapai suatu tujuan akan tetapi anggota tetap memiliki prioritas utama dalam menentukan kemandirian koperasi, karena partisipasi anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa merupakan kunci utama dalam penentuan kualitas partisipasi yang terdapat dalam koperasi. Sebagai pemilik, anggota harus dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai sumber modal koperasi, dan mengendalikan/mengawasi gerak langkah koperasi agar sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota. Sebagai pengguna jasa, anggota harus dapat memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan koperasi untuk memenuhi kepentingan anggota. Sehingga dalam hal ini kontribusinya

jelas antara anggota terhadap koperasi ataupun dari koperasi terhadap anggota yang akhirnya akan melahirkan suatu kerjasama yang baik yang membuahkan hasil berupa kemandirian. Kemandirian koperasi dalam hal ini meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan adanya partisipasi anggota secara sukarela yang semakin kuat baik dalam bentuk simpanan, transaksi-transaksi maupun pemanfaatan jasa-jasa pelayanan koperasi secara optimal. Berhasil tidaknya kemandirian koperasi tidak selalu bergantung dan ditentukan oleh tingkat pendapatan anggota melainkan oleh keyakinan melakukan usaha bersama meskipun dalam kondisi masih lemahnya tingkat ekonomi masyarakat anggota koperasi itu sendiri.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dengan idealisme mengembangkan rakyat kecil selayaknya koperasi mempertimbangkan kaidah-kaidah usaha ekonomis profesional yang tidak keluar dari jati diri koperasi. Perluasan usaha koperasi mandiri menuju globaliasi ekonomi dimungkinkan jika koperasi memiliki sarana dan prasarana pendukung diantaranya adalah modal yang memadai. Dalam praktek kemandirian koperasi tidak berarti harus menolak atau mengesampingkan bantuan dari pihak ke tiga, akan tetapi dalam perkembangan bertahap menuju posisi koperasi mandiri yang lebih mantap terkadang dibutuhkan bantuan dan dorongan dari pihak ketiga. Upaya menambah modal

dengan meminjam kepada pihak ketiga merupakan salah satu contoh kegiatan koperasi yang tidak dapat ditafsirkan sebagai satu hal yang melemahkan kemandirian koperasi, akan tetapi hal itu dapat dipandang sebagai suatu kondisi yang bersifat merangsang perkembangan koperasi dan tentunya harus dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatkan partisipasi anggota adalah suatu upaya yang baik dalam menuju koperasi mandiri, karena dengan adanya partisipasi anggota dalam posisi sebagai pemilik ataupun sebagai pemakai jasa secara optimal, maka kemandirian koperasi akan tercapai. Tentu saja hal itu tidak mudah karena memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mencapainya. Meningkatkan kualitas partisipasi anggota dengan cara mengubah sikap anggota koperasi untuk yakin dan percaya bahwa sebagai individu mereka mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dirinya melalui kerjasama dan kesetiakawanan dalam wadah koperasi. Merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh manajemen untuk mencapai koperasi mandiri yaitu dengan membuat program operasional koperasi yang

senantiasa memenuhi keinginan dan kebutuhan anggota sehingga anggota akan melakukan partisipasi secara penuh untuk koperasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri. Y.Z. 2003. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam Usahawan Indonesia No 03/Th.XXXII Maret 2003*. Jakarta: Lembaga Manajemen FE-UI.
<http://educare.e-fkipunla.net>
Generated: 2 August, 2010,
Educare: Jurnal Pendidikan dan Budaya, 03:46.
- H.R.M. Ramudi Arifien. 2004. *Nilai-nilai Koperasi Sebagai Landasan Pengelolaan Koperasi*. Infokom No. 24 Tahun XX 2004.
- Ign. Sukamdiyo. 2006. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Ropke, Jochen. 2003. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitio dan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Sukowaluyo Mintirahardjo. 2004. *Menuju Welfare State Melalui Koperasi*. Infokop Nomor 24 Tahun XX 2004.
- Tim Ikopin. 2000. *Penjiwaan Koperasi*. Bandung: Ikopin.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.